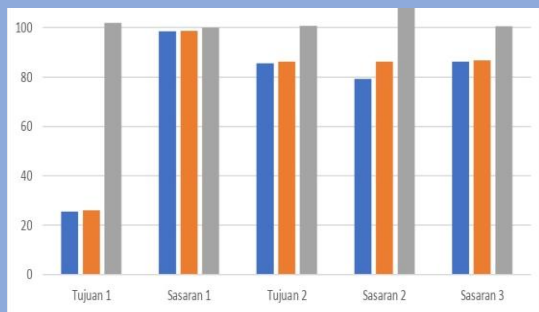


LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA BLITAR TAHUN 2024



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang tetap melimpahkan berkah, rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Blitar Tahun 2024 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Blitar tahun 2024 disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang pedoman Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Blitar tahun 2024 merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap kinerja yang telah dicapai selama tahun 2024. Laporan ini menggambarkan pencapaian indikator kinerja utama Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman pada tahun 2024 beserta permasalahan dan langkah perbaikannya.

Tanggapan (feed back) serta saran-saran untuk perbaikan terhadap laporan ini sangat diharapkan guna peningkatan kinerja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman di masa yang akan datang. Pada kesempatan ini disampaikan terima kasih kepada seluruh unsur yang telah mendukung pelaksanaan fungsi dan tugas Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Blitar.

Blitar, 26 Februari 2025

**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN KOTA BLITAR**



Drs. SUYATNO
NIP. 197304301993031004

EXECUTIVE SUMMARY

Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Blitar dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota No. 74 tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagai unsur pelaksana pemerintahan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman.

Untuk menjalankan tugas pokoknya, Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman menjalankan fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. Pendataan, perencanaan, penyediaan, pembiayaan, pemantauan dan evaluasi rumah umum;
- f. Pendataan, perencanaan, pemberdayaan, bantuan, pembiayaan, pemantauan dan evaluasi rumah swadaya;
- g. Pendataan dan perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman;
- h. Perencanaan, pelaksanaan, operasi dan pemeliharaan serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan permukiman sesuai luasan wilayah yang ditetapkan;
- i. pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan;
- j. pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan

- personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
- k. penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
 - l. penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman sesuai dengan kewenangan Daerah ;
 - m. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
 - n. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 - o. pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
 - p. pengelolaan pengaduan masyarakat;
 - q. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman secara berkala melalui *sub domain website* Pemerintah Daerah;
 - r. pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman;
 - s. perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pengembangan perumahan;
 - t. perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan perumahan dan kawasan permukiman kumuh;
 - u. perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan kawasan permukiman;
 - v. perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU);
 - w. pelaksanaan verifikasi kelengkapan pengalihan hak Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) kepada Pemerintah Daerah; dan
 - x. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya

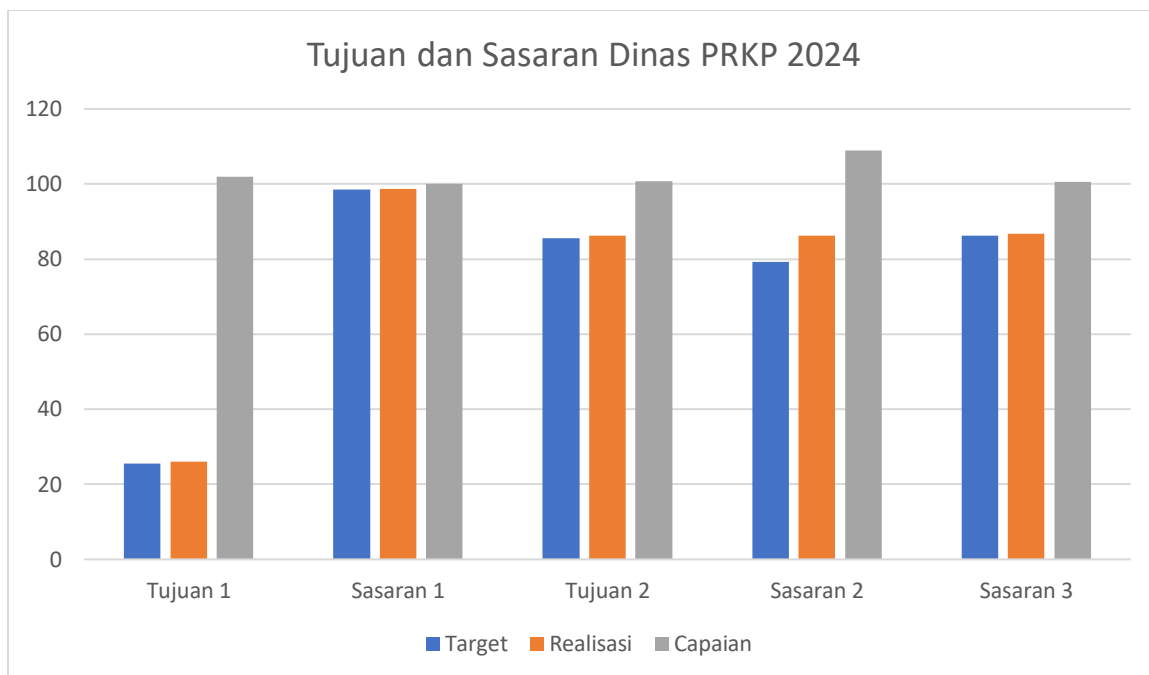
Dalam menjalankan tugasnya, terdapat isu-isu strategis di bidang perumahan maupun kawasan permukiman diantaranya terdapatnya kawasan rawan kumuh, masih tingginya kesenjangan antara ketersediaan dengan kebutuhan (backlog) perumahan/hunian, terdapat rumah tidak layak huni,

terbatasnya penyediaan dan pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), rendahnya partisipasi masyarakat dan badan usaha dalam penyediaan perumahan dan kawasan permukiman karena selama ini masyarakat cenderung pasif atau tergantung pada pemerintah dalam pembangunan perumahan dan permukiman.

Untuk menjawab isu-isu strategis tersebut dan berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya maka Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mengacu pada misi keempat yaitu **Meningkatkan Infrastruktur dan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan dan** dalam rangka mencapai tujuan RPJMD yaitu Meningkatnya kelayakhunian dengan sasaran Meningkatnya akses rumah layak huni dan Meningkatnya ketersediaan dan kualitas prasarana, sarana dan utilitas di kawasan permukiman, Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Blitar telah menyusun Rencana Strategis maupun Rencana Kinerja untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan serta sasaran yang hendak dicapai. Untuk mencapai sasaran strategis yang menjadi indikator kinerja utama Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman tersebut maka disusun program dan kegiatan yang dilaksanakan setiap tahun.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja utama dan program kegiatan selama tahun 2024, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) menguraikan pengukuran capaian kinerja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Tahun 2024 dari 2 tujuan dan 3 sasaran, dapat dilihat dari table berikut ini :

No	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Meningkatnya akses rumah layak huni	Rasio Rumah Layak Huni (Persentase RLH)	0,255 (25,5%)	0,26 (26 %)	101,96
2	Meningkatnya rumah layak huni sesuai standar	Persentase rumah layak huni	98,59	98,66	100,07
3	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas di Kawasan Permukiman	Persentase perumahan dan kawasan permukiman dengan PSU layak	85,64	86,17	100,62
4	Meningkatnya kualitas sarana prasarana di perumahan dan kawasan permukiman	Persentase perumahan dan kawasan permukiman yang dilengkapi jalan dan drainase lingkungan dalam kondisi baik	79,26	86,29	108,87
5	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP PD	A 86,30	A 86,73	100,5



Berdasarkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024 Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Blitar mendapatkan alokasi anggaran belanja sebesar Rp. 12.378.875.631,- (Dua belas milyar tiga ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah) yang dialokasikan untuk 5 program .

Adapun realisasi anggaran dalam pencapaian kinerja sebagai berikut:

No.	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
1	Program Pengembangan Perumahan	991.895.479	930.165.943	93,78
2	Program Kawasan Permukiman	2.009.760.179	1.961.355.023	98,38
3	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	3.064.942.000	3.048.376.885	99,46
4	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	1.406.889.602	1.405.197.636	99,88
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.905.388.371	4.675.910.111	95,32
TOTAL		12.378.875.631	12.036.829.598	97,24

Berdasar hasil kinerja beserta realisasi anggaran maka dapat dilihat tingkat efisiensi penggunaan anggaran terhadap pencapaian kinerja utama yaitu:

No	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
	Meningkatnya akses rumah layak huni	Rasio Rumah Layak Huni (Persentase RLH)	101,96	97,83	1,042
	Meningkatnya rumah layak huni sesuai standar	Persentase rumah layak huni	100,07	97,83	1,023
	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas di Kawasan Permukiman	Persentase perumahan dan kawasan permukiman dengan PSU layak	100,62	99,50	1,011
	Meningkatnya kualitas sarana prasarana di perumahan dan kawasan permukiman	Persentase perumahan dan kawasan permukiman yang dilengkapi jalan dan drainase lingkungan dalam kondisi baik	108,87	99,50	1,094
	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP PD	100,5	95,32	1.054

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Executive Summary (Ikhtisar Eksekutif)	iii
Daftar Isi	ix
Daftar Tabel	x
Daftar Lampiran	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	2
C. Maksud dan tujuan	6
D. Dasar Hukum	7
E. Aspek – Aspek Strategis	10
F. Isu – Isu Strategis	11
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	13
A. Rencana Strategis 2021 – 2026	13
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	18
A. Pengukuran Capaian Kinerja / Sasaran	18
1. Analisis Capaian Kinerja berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2024	19
2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 – 2024	28
3. Perbandingan Realisasi Kinerja s.d akhir Periode Renstra	31
4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional (Target SPM)	32
B. Akuntabilitas Keuangan (Cost per Outcome)	35
1. Alokasi Per Sasaran Pembangunan	36
2. Pencapaian Kinerja dan Anggaran	37
3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	49
C. Prestasi / Penghargaan	51
BAB IV PENUTUP	54
A. Kesimpulan	54
B. Langkah Perbaikan	56

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data Aparatur Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar Tahun 2024	6
Tabel 2.1	Keterkaitan RPJMD dan RENSTRA Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar	14
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Tahun 2024	16
Tabel 2.3	Program Tahun 2024	17
Tabel 3.1	Atribut Capaian masing-masing Indikator Kinerja	18
Tabel 3.2	Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024	19
Tabel 3.3	Jumlah Rumah Layak Huni dan Jumlah Penduduk Kota Blitar Tahun 2024	20
Tabel 3.4	Jumlah Rumah dan Jumlah RLH Kota Blitar Tahun 2024	21
Tabel 3.5	Jumlah Kawasan dengan PSU Layak di Kota Blitar Tahun 2024	23
Tabel 3.6	Kondisi Jalan dan Drainase Lingkungan Kota Blitar	24
Tabel 3.7	Target dan Realisasi Nilai SAKIP Dinas PRKP Tahun 2024	25
Tabel 3.8	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 – 2024	29
Tabel 3.9	Capaian Misi ke 4 dan Sapta Program yang diampu Dinas PRKP	30
Tabel 3.10	Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Akhir Periode Renstra	31
Tabel 3.11	Realisasi SPM Tahun 2024	33
Tabel 3.12	Alokasi per Sasaran Pembangunan	36
Tabel 3.13	Pencapaian Kinerja dan Anggaran	37
Tabel 3.14	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	49
Tabel 4.1	Rencana Tindak Lanjut LKjIP Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar	56

Lampiran –Lampiran :

- A. Matrik Rencana Strategis Dinas PRKP Tahun 2021 – 2026
- B. Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2024
- C. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- D. Pengukuran Kinerja Tahun 2024

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mekanisme evaluasi dan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah, menempatkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) menjadi salah satu tolok ukur untuk melihat tingkat keberhasilan atau bahkan sebuah kegagalan terhadap program yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Sebagaimana ditetapkan dalam Permenpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) setiap akhir tahun anggaran, sebagai sebuah bentuk pertanggungjawaban atas tugas dan fungsi selama satu tahun anggaran. Disamping sebagai kewajiban, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) pada hakekatnya merupakan kebutuhan pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan pembangunan yang berkualitas, dalam arti mengalami peningkatan/penurunan baik dari sisi pelaksanaan maupun hasil-hasilnya.

Pertanggungjawaban kinerja dapat dicermati dengan menggunakan sistem dan prosedur yang dimulai dari pengukuran kinerja sasaran strategis. Selanjutnya dari hasil pengukuran kinerja dilakukan evaluasi kinerja program dan kegiatan dan evaluasi kinerja kebijakan daerah yang mendukung pencapaian sasaran strategis.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Blitar Tahun 2024 dimaksudkan sebagai salah satu media untuk mengukur tingkat pelaksanaan akuntabilitas kinerja organisasi. Sebagai media

hubungan kerja organisasi, laporan ini memuat informasi dan data yang telah diolah, meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan tanggung jawab (responsibilitas) atas pemberian mandat, delegasi wewenang ataupun amanah, terkait dengan berbagai sumberdaya yang digunakan untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Kota Blitar. Dengan demikian Laporan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Blitar diharapkan dapat menjadi Umpan balik bagi peningkatan kinerja dan Wahana untuk mengetahui dan menilai keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab instansi serta sebagai evaluasi atas kinerja organisasi periode akhir masa jabatan walikota sebagaimana janji politik yang wajib dicapai diakhir masa jabatan.

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota No. 74 tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang menjadi kewenangan daerah dan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota Blitar melalui Sekretaris Daerah dengan tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan. Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Blitar menjalankan fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;

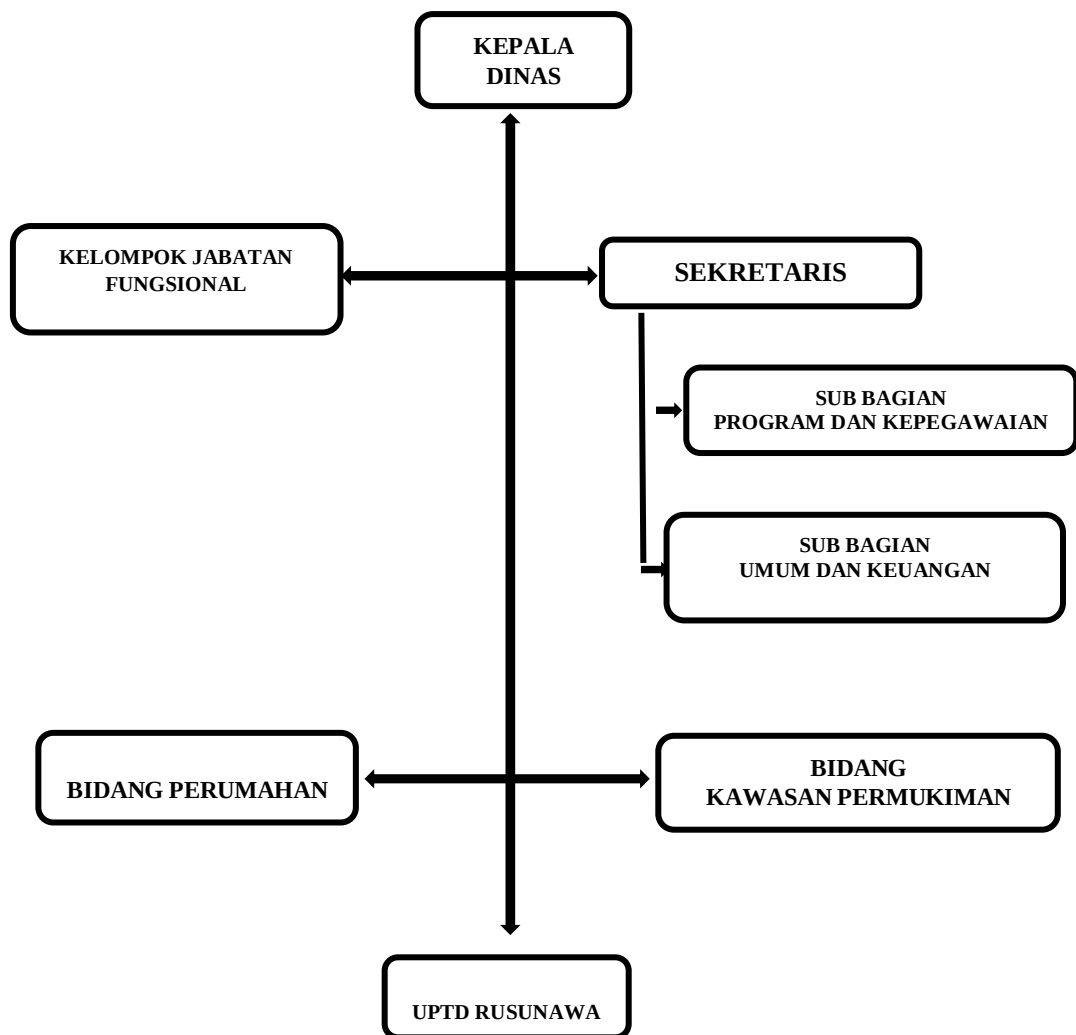
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. Pendataan, perencanaan, penyediaan, pembiayaan, pemantauan dan evaluasi rumah Negara, komersial, umum dan khusus;
- f. Pendataan, perencanaan, pemberdayaan, bantuan, pembiayaan, pemantauan dan evaluasi rumah swadaya;
- g. Pendataan dan perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman;
- h. Perencanaan, pelaksanaan, operasi dan pemeliharaan serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan permukiman sesuai luasan wilayah yang ditetapkan;
- i. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan;
- j. pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
- k. penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
- l. penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman sesuai dengan kewenangan Daerah ;

- m. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- n. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- o. pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
- p. pengelolaan pengaduan masyarakat;
- q. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman secara berkala melalui *sub domain website* Pemerintah Daerah;
- r. pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman;
- s. perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pengembangan perumahan;
- t. perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan perumahan dan kawasan permukiman kumuh;
- u. perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan kawasan permukiman;
- v. perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) sesuai luasan wilayah yang ditetapkan;
- w. pelaksanaan verifikasi kelengkapan pengalihan hak Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) kepada Pemerintah Daerah; dan
- x. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya

Susunan organisasi **Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman**, terdiri dari Kepala Dinas, Sekretariat Dinas, 2 (dua) Bidang, 2 (dua) Sub Bagian dan UPTD Rusunawa, sebagaimana struktur organisasi berikut :

Struktur organisasi Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Blitar sebagai berikut:

Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Blitar



Aparatur Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman berjumlah 23 orang dengan rincian 22 orang berstatus PNS dan 1 orang PPPK. Adapun rincian sumberdaya aparatur Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Data Aparatur Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman Kota Blitar
Tahun 2024

No	Pangkat/Gol, Tingkat Pendidikan dan Jabatan	Jenis Kelamin (Orang)		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
PANGKAT/GOL.RUANG				
1.	Pembina Utama Muda (IV/c)	0	0	0
2.	Pembina Tk.I (IV/b)	1	1	2
3.	Pembina (IV/a)	1	1	2
4.	Penata Tk. I (III/d)	2	3	5
5.	Penata (III/c)	0	0	0
6.	Penata Muda Tk I (III/b)	4	1	5
7.	Penata Muda (III/a)	2	2	4
8.	Pengatur Tk I (II/d)	2	1	3
9.	Pengatur (II/c)	0	0	0
10.	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	0	0	0
11.	Pengatur Muda (II/a)	1	0	1
12.	Juru Tk. I (I/d)	0	0	0
13.	Juru (I/c)	0	0	0
14.	Juru Muda Tk. I (I/b)	0	0	0
15.	Juru Muda (I/a)	0	0	0
16.	PPPK	0	1	1
JUMLAH		13	10	23
TINGKAT PENDIDIKAN				
1.	Pasca Sarjana (S2)	2	1	3
2.	Sarjana (S1)	7	6	13
3.	Diploma	2	2	4
4.	SLTA	1	1	2
5.	SLTP	0	0	0
6.	SD	1	0	1
JUMLAH		13	10	23

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan LKjIP ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Blitar dan sarana

untuk mengkomunikasikan dan menjawab kinerja yang telah di targetkan dan bagaimana proses pencapaiannya serta sebagai evaluasi atas kinerja organisasi periode akhir masa jabatan walikota sebagaimana janji politik yang wajib dicapai diakhir masa jabatan.

D. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan LKj IP Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan permukiman Kota Blitar Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2010 tentang RPJPD Kota Blitar Tahun 2005 - 2025 ;
13. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026;
14. Peraturan Daerah No. 4 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah No. 7 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 4 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2024;
17. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun 2024;
18. Peraturan Walikota Blitar Nomor 68 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

19. Peraturan Walikota Blitar Nomor 40 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
20. Peraturan Walikota Blitar Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026.
21. Peraturan Walikota Blitar Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2024;
22. Peraturan Walikota Blitar Nomor 74 tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
23. Peraturan Walikota Blitar Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2024;
24. Peraturan Walikota Blitar Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
25. Peraturan Walikota Blitar Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 99 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Blitar Tahun 2022 – 2026;
26. Peraturan Walikota Blitar nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
27. Peraturan Walikota Blitar Nomor 28 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;

28. Peraturan Walikota Blitar Nomor 37 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
29. Peraturan Walikota Blitar Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2024;
30. Peraturan Walikota Blitar Nomor 44 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
31. Peraturan Walikota Blitar Nomor 52 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2024.

E. Aspek – Aspek Strategis

Layanan Urusan Wajib terkait Pelayanan Dasar kepada masyarakat, Secara teknis penerapan SPM di Kota Blitar berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, dan diprioritaskan bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar

Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Perumahan Rakyat kabupaten/kota terdiri atas:

- a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota; dan
- b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Jenis Pelayanan Dasar Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota merupakan jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, dengan ketentuan:

- 1) Pada saat masa pasca bencana;
- 2) Surat penetapan bencana dari Bupati/Walikota; dan/atau
- 3) Dampak bencana di daerah administrasi kabupaten/kota.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ikut mendukung terhadap suksesnya Misi ke empat (4) Meningkatkan Infrastruktur dan Tata Ruang Yang Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan, Tujuan Meningkatnya Kelayakhunian, Indikator Rasio Permukiman Layak Huni. Sasaran Meningkatnya akses rumah layak huni dengan indicator Rasio Rumah Layak Huni.

Sapta Program Prioritas Kota Blitar, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ikut mendukung program ke 6 (enam) yaitu Program Blitar Membangun dan Kondusif dengan kegiatan Bedah Rumah yang telah dilaksanakan tiap tahun.

F. Isu-isu Strategis

Isu strategis dapat dijadikan acuan bagi pemerintah dalam menentukan langkah-langkah penyelesaian pembangunan yang

berpihak kepada masyarakat, sehingga pembangunan yang dilaksanakan tepat sasaran. Isu strategis yang berkaitan dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar adalah belum tertatanya kawasan permukiman sehingga permukiman layak huni di Kota Blitar masih belum optimal. Hal ini ditandai dengan masih adanya rumah tidak layak huni serta Prasarana Sarana Utilitas (PSU) terutama jalan dan drainase lingkungan di perumahan dan kawasan permukiman dalam kondisi kurang baik.

Kondisi jalan dan drainase yang kurang baik mengakibatkan adanya kawasan kumuh perkotaan. Penanganan kawasan kumuh di Kota Blitar berdasarkan Keputusan Walikota Blitar Nomor 188/338/HK/410.010.2/2020 terdapat sisa kawasan kumuh seluas 43,08 Ha. Dengan adanya koordinasi dan kolaborasi antar OPD dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dalam penanganan jalan dan drainase lingkungan di kawasan perumahan dan permukiman, juga adanya program RT Keren sangat membantu penurunan kawasan kumuh di Kota Blitar.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2021 - 2026

Rencana Strategis dihasilkan melalui suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan tahun 2024 secara sistematis dan berkesinambungan dengan mempertimbangkan faktor-faktor antara lain, kondisi riil, potensi, hambatan, resiko serta pengembangan kedepan, sehingga tujuan dan sasaran Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Blitar dapat mendukung perwujudan visi dan misi Kota Blitar. Proses tersebut telah menghasilkan Renstra Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Blitar yang memuat tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan tahun 2024.

Visi KotaBlitar sebagaimana tertuang dalam RPJMD KotaBlitar Tahun 2021- 2026 adalah : “Terwujudnya Kota Blitar Keren : Unggul, Makmur, Bermartabat”. Adapun Misi Kota Blitar tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Tata Kehidupan yang Religius, Nasionalis, Setara Gender, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan;
2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Keren, Berdaya Saing, Sehat Jasmani-Rohani, Cerdas dan Berkarakter;
3. Berdikari secara ekonomi yang berorientasi pada ekonomi kreatif, pariwisata, dan perdagangan berbasis digital;
4. Mewujudkan Infrastruktur dan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan;
5. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi.

Erat kaitannya dengan pencapaian visi misi Kota Blitar, maka dokumen perencanaan strategis Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Blitar harus dapat mengintegrasikan kepentingan dari berbagai unsur dan komponen yang ada serta dapat diimplementasikan dalam rencana kerja tahunan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Blitar.

Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran pada Misi Keempat yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Blitar diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1 Keterkaitan RPJMD dan RENSTRA Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar

RPJMD KOTA BLITAR, MISI : 4 Meningkatkan Infrastruktur dan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan			RENSTRA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Meningkatnya kelayak hunian	1. Meningkatkan akses rumah layak huni	Rasio Rumah Layak Huni	1. Meningkatkan akses rumah layak huni	Meningkatnya a rumah layak huni sesuai standar	Persentase rumah layak huni
	2. Meningkatkan kesediaan dan kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas di kawasan permukiman	Persentase perumahan dan kawasan permukiman dengan PSU layak	2. Meningkatkan kesediaan dan kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas di kawasan permukiman	Meningkatnya kualitas sarana prasarana di perumahan dan kawasan permukiman	Persentase perumahan dan kawasan permukiman yang dilengkapi jalan dan drainase lingkungan dalam kondisi baik
	3. Meningkatkan Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP PD	3. Meningkatkan tata kelola perangkat daerah	Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP PD

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar mempedomani Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar untuk Tahun 2021 – 2026. Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar pada Tahun Anggaran 2021 sampai dengan 2026 dengan memuat visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan tahun 2026. Adapun Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 secara terperinci sebagaimana dalam “ **Lampiran 1. Matriks Rencana Strategis Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2021 – 2026**”.

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Rencana Kinerja Tahun 2024 Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Blitar adalah penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Blitar Tahun 2021-2026. Rencana kinerja tersebut diuraikan dan ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, yang merupakan komitmen Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Blitar dalam pencapaian sasaran dan tujuan selama Tahun 2024 yang didukung dengan program dan kegiatan. Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman selama Tahun 2024 dan keselarasannya dengan pencapaian RENSTRA 2021-2026 diuraikan dalam Tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2 : Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Akses Rumah Layak Huni	Rasio Rumah Layak Huni	0,255
2	Meningkatnya rumah layak huni sesuai standar	Persentase Rumah Layak Huni	98,59 %
3	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas di Kawasan Permukiman	Persentase perumahan dan kawasan permukiman dengan PSU layak	85,64 %
4	Meningkatnya kualitas sarana prasarana di perumahan dan kawasan permukiman	Persentase perumahan dan kawasan permukiman yang dilengkapi jalan dan drainase lingkungan dalam kondisi baik	79,26 %
5	Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP PD	A 86,30

Program

Untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan tersebut, maka program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing Bidang di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Blitar dijabarkan dalam 5 (lima) program sebagai berikut :

Tabel 2.3
Program Tahun 2024

No.	PROGRAM	ANGGARAN
1	Program Pengembangan Perumahan	991.895.479
2	Program Kawasan Permukiman	2.009.760.179
3	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	3.064.942.000
4	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	1.406.889.602
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.905.388.371
JUMLAH		12.378.875.631

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Capaian Kinerja/Sasaran

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi pemerintah daerah. Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara :

- a. membandingkan realisasi Kinerja dengan Sasaran (target) Kinerja yang dicantumkan dalam lembar / dokumen Perjanjian Kinerja dalam rangka pelaksanaan APBD
- b. membandingkan realisasi kinerja Program sampai dengan tahun berjalan dengan Sasaran (target) Kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis SKPD

Adapun cara menghitung capaian indikator kinerja dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Prosentase tingkat capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Sedangkan pemberian atribut pada capaian masing – masing indikator kinerja, dengan kriteria yaitu :

Tabel 3.1 Atribut Capaian masing-masing Indikator Kinerja

No	Nilai Capaian Kinerja		Pemberian Atribut
	%	Keterangan Prosentase	
1.	85 % s.d 100 %	Delapan puluh lima persen sampai dengan seratus persen	Sangat Berhasil
2.	70 % s.d < 85 %	Tujuh puluh persen sampai dengan kurang dari delapan puluh lima persen	Berhasil

No	Nilai Capaian Kinerja		Pemberian Atribut
	%	Keterangan Prosentase	
3.	55 % s.d < 70 %	Lima puluh lima persen sampai dengan kurang dari tujuh puluh persen	Cukup Berhasil
4.	< 55 %	Di bawah lima puluh lima persen	Tidak Berhasil

1. Analisis Capaian Kinerja berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2024

Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Blitar telah melaksanakan kinerja berdasarkan indikator kinerja sasaran strategis dan tujuan strategis yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja. Dari hasil pengukuran kinerja tahun 2024 diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2 Capaian masing-masing Indikator Kinerja

Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja Tahun 2024		
		Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya akses rumah layak huni	Rasio Rumah Layak Huni	0,255	0,26	101,96
Meningkatnya rumah layak huni sesuai standar	Persentase Rumah Layak Huni	98,59	98,66	100,07
Meningkatnya ketersediaan dan kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas di Kawasan Permukiman	Persentase perumahan dan kawasan permukiman dengan PSU layak	85,64	86,17	100,62
Meningkatnya kualitas sarana prasarana di perumahan dan kawasan permukiman	Persentase perumahan dan kawasan permukiman yang dilengkapi jalan dan drainase lingkungan dalam kondisi baik	79,26	86,29	108,87
Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP PD	A 86,30	A 86,73	100,5

Capaian Sasaran Strategis selama tahun 2024 dapat disampaikan sebagai berikut :

- a. Tujuan Strategis Meningkatnya akses rumah layak huni dengan indicator Rasio Rumah Layak Huni dengan formulasi perhitungan Jumlah Rumah Layak Huni dibagi Jumlah Penduduk dengan target 0,255 didapatkan realisasi 0,26 dengan capaian 101,96. Jumlah Rumah Layak Huni adalah 41.971 unit sedangkan jumlah penduduk adalah 161.204 jiwa (rilis Dispendukcapil Kota Blitar)

Tabel. 3.3
Jumlah Rumah layak Huni dan Jumlah Penduduk Kota Blitar Tahun 2024

No	Lokasi	Jumlah Rumah Layak Huni	Jumlah Penduduk	%
1	Kota Blitar	41.971 unit	161.204 jiwa	0,26

Faktor Pendorong tercapainya target adalah Regulasi terkait rumah layak huni cukup jelas.

Permasalahan Yang dihadapi :

- o Kenaikan jumlah Rumah Layak Huni tidak sebanding dengan pertumbuhan jumlah penduduk,
- o Penerapan standar teknis Rumah Layak Huni di lapangan oleh sebagian masyarakat khususnya masyarakat berpenghasilan rendah terkendala keterbatasan kemampuan ekonomi

Tindak lanjut yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- o Dilaksanakan sosialisasi standar teknis rumah layak huni
 - o Pendampingan dalam penerapan standar rumah layak huni pada program stimulan bansos.
- b. Sasaran Strategis Meningkatnya rumah layak huni sesuai standar, dengan indikator Persentase Rumah Layak Huni dengan formula indikator Jumlah rumah layak huni sesuai standar kelayakan

bangunan/jumlah rumah x 100% dengan realisasi 98,66% dari target 98,59% sehingga tercapai 100,07%.

Adapun jumlah rumah dan jumlah rumah layak huni di Kota Blitar tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4

Jumlah Rumah dan Jumlah Rumah Layak Huni Kota Blitar Tahun 2024

No.	LOKASI	Jumlah Rumah Layak Huni Sesuai Standar	Jumlah Rumah	%
1.	Kota Blitar	41.971	42.542	98,66

Berdasarkan tabel di atas diketahui pada tahun 2024 Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman sudah mencapai target yang ditetapkan. Pada akhir tahun 2024 jumlah rumah di Kota Blitar adalah sejumlah 42.542 unit sedangkan jumlah rumah layak huni sejumlah 41.971 unit sehingga Persentase Rumah Layak Huni adalah 98,66 %.

Faktor pendorong tercapainya target yang direncanakan adalah karena adanya kebijakan pemerintah untuk memberikan fasilitasi dana subsidi bagi masyarakat yang kurang mampu (MBR) untuk mengikuti program peningkatan kualitas rumah tidak layak huni baik melalui peningkatan kualitas maupun pembangunan rumah baru berswadaya.

Permasalahan yang dihadapi adalah :

1. Terdapat fenomena penambahan data terus menerus dari usulan masyarakat
2. Tingkat keswadayaan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang terbatas guna pemenuhan kebutuhan Rumah Layak Huni

Adapun tindak lanjut yang dilakukan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan Verifikasi dan updating data serta penguatan regulasi terkait standar rumah layak huni serta klasifikasi penerima program
2. Melaksanakan sosialisasi guna meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam keswadayaan peningkatan kualitas rumah dan Penguatan proses verifikasi penerima program

Adapun peran Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dalam upaya peningkatan pemenuhan kebutuhan rumah layak huni diantaranya adalah dengan rehabilitasi rumah tidak layak huni sehingga menjadi layak, fasilitasi perbaikan rumah bagi korban bencana, fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah. Selain itu juga disusun manajemen resiko pada peningkatan RTLH untuk menghadapi segala kemungkinan yang terjadi yang mungkin berdampak negatif pada sasaran strategis yang hendak dicapai. Pada tahun 2024 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman melalui Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh melakukan peningkatan kualitas RTLH sebanyak 206 unit, pembangunan rumah swadaya untuk MBR sebanyak 15 unit dan memfasilitasi jaringan listrik untuk MBR sebanyak 10 unit. Disamping itu tahun 2024 terdapat Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (**BSPS**) Kementerian PUPR di Kota Blitar untuk peningkatan 111 unit rumah sedangkan dari Program Rumah Sejahtera Terpadu Kemensos adalah 6 unit rumah sehingga akan membantu mempercepat tercapainya kelayakhunian di Kota Blitar.

- c. Tujuan Strategis Meningkatnya ketersediaan dan kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas di Kawasan Permukiman dengan indicator kinerja Persentase perumahan dan kawasan permukiman

dengan PSU layak dari target 85,64 didapatkan realisasi 86,17 dan capaian kinerja 100,62 %. Capaian didapatkan dari jumlah kawasan yang telah dilengkapi PSU layak adalah 162 kawasan.

Tabel 3.5.
Jumlah Kawasan dengan PSU layak dan Jumlah
Kawasan di Kota Blitar

No	Jumlah Kawasan dengan PSU Layak	Jumlah Kawasan Kota Blitar	%
1	162	188	86,17

Faktor Pendorong :

Adanya Kolaborasi antar perangkat daerah dalam rangka penyediaan dan peningkatan kualitas PSU di kawasan permukiman sesuai dengan kewenangan.

Permasalahan :

Adanya tumpang tindih dalam penanganan PSU di kawasan permukiman yang dilakukan oleh OPD dengan kegiatan OPD lain (Program RT Keren)

Tindak lanjut yang dilakukan :

Perlu adanya koordinasi antar OPD dalam merencanakan suatu kegiatan sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan kegiatan.

- d. Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas sarana prasarana di perumahan dan kawasan permukiman, dengan indikator Persentase perumahan dan kawasan permukiman yang dilengkapi jalan dan drainase lingkungan dalam kondisi baik merupakan rata-rata jalan dan drainase lingkungan di kawasan perumahan dan permukiman dalam kondisi baik. Realisasi Capaian kinerja tercapai 108,87 % yang berasal dari perhitungan target 79,26% dengan realisasi 86,29 % pada tahun 2024. Pada tahun 2024 Bidang kawasan permukiman melakukan peningkatan jalan dan drainase sehingga tercapai jalan lingkungan permukiman dalam kondisi baik sepanjang 200.499,85 meter dan drainase lingkungan permukiman dalam kondisi baik sepanjang 119.726,55 meter, sedangkan Bidang

Perumahan melakukan peningkatan jalan dalam kondisi baik 30030,8 m dan drainase dalam kondisi baik di kawasan perumahan sepanjang 16087,46 meter. Dengan adanya peningkatan jalan dan drainase juga program RT Keren akan dapat mengurangi kawasan kumuh di Kota Blitar seluas 11,43 Ha. Sisa kawasan kumuh berdasarkan Keputusan Walikota Blitar Nomor 188/338/HK/410.010.2/2020 adalah 43,08 Ha.

Tabel 3.6.
Kondisi Jalan dan Drainase Lingkungan Kota Blitar

Persentase perumahan dan kawasan permukiman yang dilengkapi jalan dan drainase lingkungan dalam kondisi baik	86,29 %	(Rata-rata Persentase Jalan lingkungan di kawasan perumahan dan permukiman dalam kondisi baik dan Persentase Drainase lingkungan di kawasan perumahan dan permukiman dalam kondisi baik)
Panjang jalan lingkungan	235.592,00 m	
Panjang jalan lingkungan dalam kondisi baik	200.499,85 m	
Persentase Jalan lingkungan di kawasan perumahan dan permukiman dalam kondisi baik	85,10 %	(Panjang jalan lingkungan dalam kondisi baik dibagi panjang jalan lingkungan) x 100
Panjang drainase lingkungan	136.861,00 m	
Panjang drainase lingkungan dalam kondisi baik	119.726,55 m	
Persentase Drainase lingkungan di kawasan perumahan dan permukiman dalam kondisi baik	87,48 %	(Panjang drainase lingkungan dalam kondisi baik dibagi panjang drainase lingkungan) x 100

Faktor pendorong pencapaian target adalah Adanya koordinasi dan kolaborasi antar OPD dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dalam penanganan jalan dan drainase lingkungan di kawasan perumahan dan permukiman, sedangkan permasalahan

yang yang dihadapi adalah Penanganan jalan lingkungan dan drainase lingkungan yang dilakukan DPRKP hanya pada kawasan kumuh dan pada perumahan yang dibangun oleh pengembang dengan aset PSU nya telah diserahkan kepada pemerintah, namun untuk IKU mencakup jalan dan drainase lingkungan di semua kawasan perumahan dan permukiman, untuk menjawab permasalahan tersebut dilakukan tindak lanjut dengan melakukan koordinasi dan kolaborasi antar Perangkat Daerah dalam penanganan jalan dan drainase lingkungan di kawasan perumahan dan permukiman.

- e. Sasaran Strategis Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah, dengan indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan target A (86,30) berhasil mendapatkan nilai A (86,73) dengan capaian 102, 118 %.

Tabel 3.7
Target dan Realisasi Nilai SAKIP Dinas PRKP Tahun 2024

Target	Realisasi	%
A (86,30)	A (86,73)	102, 118

Sesuai dengan capaian kinerja pada dasarnya sudah melampaui target yang telah ditetapkan, namun masih ada beberapa rekomendasi hasil evaluasi implementasi SAKIP yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah yaitu:

1. Dokumen Perencanaan pada Dinas Perumahan rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Blitar tidak di publikasikan tepat waktu;
2. Dokumen perencanaan kinerja belum menggambarkan hubungan yang berkesinambungan serta selaras antara kondisi/hasil yang akan di capai disetiap level jabatan dan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan

bahkan aktivitas antar bidang / dengan tugas dan fungsi yang lain yang berkaitan;

3. Dokumen perencanaan kinerja dan target kinerja telah dimanfaatkan untuk pengukuran kinerja. Pemantauan capaian kinerja dilaksanakan sampai dengan tahun berjalan telah dilaksanakan, namun aktivitas yang dilaksanakan tidak mendukung kinerja;
4. Capaian kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman telah dimonitor pencapaiannya, pengumpulan data kinerja yang dikumpulkan belum sepenuhnya didukung dengan data kinerja yang cukup relevan untuk mengukur serta belum sepenuhnya mendukung capaian kinerja yang di harapkan;
5. Pengumpulan data kinerja pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman belum sepenuhnya memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi), sedangkan untuk pengukuran data kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman telah memanfaatkan teknologi informasi berupa aplikasi A-SAKIP yang dilakukan untuk mengukur capaian kinerja tribulanan;
6. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman belum memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja yang ditunjukkan dengan adanya action plan pada monitoring dan evaluasi pada rencana aksi (indikator sasaran). Pengukuran kinerja organisasi antara lain telah dilaksanakan dengan melakukan monitoring dan evaluasi rencana aksi tribulanan dan sebagian telah mempengaruhi penyesuaian aktitas dan penyesuaian anggaran namun belum mempengaruhi pada penyesuaian kebijakan dan strategi dalam mencapai kinerja;
7. Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja telah ditindaklanjuti

namun perlu dimanfaatkan lebih optimal untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja, belum dimanfaatkan dalam mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja serta belum sepenuhnya dilakukan perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja.

Adapun langkah yang diambil adalah :

- ✓ Mempublikasikan Dokumen Perencanaan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar tepat waktu;
- ✓ Mengintegrasikan crosscutting ke dalam SOP serta menyusun SOP aktivitas antar bidang sesuai dengan tugas fungsinya;
- ✓ Menyusun aktivitas dalam rencana aksi yang secara optimal dapat mendukung kinerja;
- ✓ Menyusun dan mengimplementasikan mekanisme / SOP pengumpulan data kinerja serta melakukan evaluasi terhadap pengukuran kinerja untuk mendukung capaian kinerja yang diharapkan;
- ✓ Memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi) dalam upaya pencapaian pengukuran data kinerja lebih optimal;
- ✓ Memanfaatkan hasil monitoring dan evaluasi pengukuran kinerja untuk penyesuaian strategi dan kebijakan dalam mencapai kinerja;
- ✓ Memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja, perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi.

Adapun factor pendukung pencapaian kinerja adalah adanya komitmen dari semua jajaran yang ada di Dinas Perumahan

Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja.

Permasalahan :

Terdapat beberapa catatan hasil evaluasi SAKIP yang perlu mendapat perbaikan, seperti terkait publikasi dokumen perencanaan, Kesenambungan dan keselarasan antara kondisi/hasil yang akan dicapai disetiap level jabatan, pengukuran kinerja, pengumpulan data kinerja, dan lain sebagainya.

Tindak Lanjut:

Untuk itu pada tahun-tahun mendatang untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian Nilai SAKIP maka Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar akan memanfaatkan rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal secara optimal untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 – 2024

Perbandingan capaian tahun 2022 sampai 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.8 Perbandingan Realisasi Kinerja
Tahun 2022 - 2024**

TUJUAN dan SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	2022			2023			2024		
		Target	Realisasi	% Capaian Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
Meningkatnya akses rumah layak huni	Rasio Rumah Layak Huni	0,248	0,251	101,21	0,25	0,251	100,4	0,255	0,26	101,96
Meningkatnya rumah layak huni sesuai standar	Persentase Rumah Layak Huni	96,37 %	97,43 %	101,09	96,99 %	98,13 %	101,175	98,59 %	98,66 %	100,07
Meningkatnya ketersediaan dan kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas di Kawasan Permukiman	Persentase perumahan dan kawasan permukiman dengan PSU layak	70,74 %	76,83 %	108,61	74,47 %	77,13 %	103,57	85,64 %	86,17 %	100,62
Meningkatnya kualitas sarana prasarana di perumahan dan kawasan permukiman	Persentase perumahan dan kawasan permukiman yang dilengkapi jalan dan drainase lingkungan dalam kondisi baik	68,62 %	76,83 %	111,96	73,94 %	77,13 %	104,134	79,26 %	86,29 %	108,87
Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP PD	84,51	85,88	101,62	84,51	86,30	102,118	86,30	86,73	100,5

Berdasarkan tabel di atas, dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan dikarenakan program, kegiatan dan sub kegiatan telah berjalan selaras dan juga dukungan dari aparat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman khususnya juga masyarakat Kota Blitar umumnya yang selalu mendukung program kerja pemerintah .

Faktor yang mendukung dalam pencapaian kinerja yaitu sinergitas para stakeholder di bidang perumahan dan kawasan permukiman cukup baik, permasalahan yang masih dihadapi adalah pertumbuhan jumlah penduduk akan selalu membutuhkan ruang untuk pemenuhan kebutuhan akan fungsi hunian. Dikarenakan hal tersebut maka Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman selalu mengoptimalkan seluruh sumber daya yang tersedia guna peningkatan rumah layak huni, PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman yang representative.

Sebagai evaluasi atas kinerja organisasi periode akhir masa jabatan walikota sebagaimana janji politik yang wajib dicapai diakhir masa jabatan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ikut bertanggungjawab terhadap suksesnya Misi ke empat (4) Meningkatkan Infrastruktur dan Tata Ruang Yang Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan dan juga Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ikut mendukung Sapta Program ke 6 (enam) yaitu Program Blitar Membangun dan Kondusif dengan kegiatan Bedah Rumah, sebagaimana table berikut ini

Tabel 3.9. Capaian Misi ke 4 yang diampu Dinas PRKP

Tujuan/Sasaran Misi 4/ Sapta Program	Indikator	Realisasi		
		2022	2023	2024
Meningkatnya Kelayakhunian	Rasio Permukiman Layak Huni	0,975	0,981	0,984
Meningkatnya akses rumah layak huni	Rasio Rumah Layak Huni	0,251	0,251	0,26
Blitar Membangun dan Kondusif	Bedah Rumah	282	287	206

3. Perbandingan Realisasi Kinerja s.d akhir Periode Renstra

Realisasi Kinerja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman sampai dengan 2024 bila dibandingkan dengan akhir periode Renstra dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.10 Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Akhir Periode Renstra

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI s.d 2024	TINGKAT KEMAJUAN
1	Meningkatnya akses rumah layak huni	Rasio Rumah Layak Huni	0,255	0,26	101,96 %
1.1	Meningkatnya rumah layak huni sesuai standar	Persentase Rumah Layak Huni	98,79 %	98,66 %	99,87 %
2	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas di Kawasan Permukiman	Persentase perumahan dan kawasan permukiman dengan PSU layak	85,64 %	86,17 %	100,62 %
2.1	Meningkatnya kualitas sarana prasarana di perumahan dan kawasan permukiman	Persentase perumahan dan kawasan permukiman yang dilengkapi jalan dan drainase lingkungan dalam kondisi baik	89,89 %	86,29 %	95,99 %
3	Meningkatnya kinerja Peringkat Daerah	Nilai SAKIP PD	A 84,57	A 86,73	102,55 %

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa tujuan strategis pertama yaitu Meningkatkan akses rumah layak huni dengan indikator kinerja Rasio Rumah Layak Huni tahun 2024 dengan realisasi 0,26 bila dibandingkan dengan target renstra telah

mengalami kemajuan 101,96 %, tujuan startegis kedua yaitu Meningkatnya ketersediaan dan kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas di Kawasan Permukiman dengan indicator kinerja Persentase perumahan dan kawasan permukiman dengan PSU layak dengan realisasi tahun 2024 sebesar 95,28 % bila dibandingkan dengan target akhir renstra mengalami kemajuan 100,62 % sedangkan sasaran strategis pertama yaitu Meningkatnya rumah layak huni sesuai standar tahun 2024 dengan realisasi 98,66 % bila dibandingkan dengan target Renstra pada akhir periode telah mengalami kemajuan sebesar 99,87 %. Sedangkan pada kinerja Meningkatnya kualitas sarana prasarana di perumahan dan kawasan permukiman dari target Renstra 89,89 % telah tercapai 86,29 % dan mengalami kemajuan sebesar 95,99 %. Pada Sasaran Strategis Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah dengan indicator kinerja Nilai SAKIP PD mengalami tingkat kemajuan 102,55 % jika dibandingkan antara realisasi tahun 2024 yaitu 86,73 dengan target Renstra pada akhir periode yaitu 84,57.

Selain menangani kawasan kumuh, Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman juga melakukan pencegahan terhadap munculnya permukiman kumuh baru dengan melaksanakan koordinasi dengan program RT Keren dan OPD yang menangani peningkatan jalan dan drainase lingkungan di Kota Blitar dan melakukan pendataan kawasan yang berpotensi munculnya kawasan kumuh baru.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional (Target SPM)

Pada tahun 2024 tingkat pencapaian kinerja urusan perumahan diukur berdasarkan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.11 Realisasi SPM Tahun 2024

Indikator	Nilai Tahun Target Pencapaian	Perhitungan	Angka	Capaian Kinerja 2024
Jenis Pelayanan Dasar Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana	100 %	$\frac{\text{Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n}}{\text{Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n}} \times 100\%$	1 - 1	100 %
Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah	100 %	$\frac{\text{Rumah Tangga Penerima Fasilitas Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni}}{\text{Jumlah Total Rumah Tangga Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah yang Memenuhi Kriteria Penerima Pelayanan}} \times 100\%$	1 - 1	100 %

Adapun jenis kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2024 dalam upaya mendukung pencapaian SPM meliputi :

1. Persiapan Kegiatan Bidang Perumahan Rakyat

Kegiatan ini dilaksanakan di Jum'at, 26 April 2024 yang bertujuan untuk memberikan pengarahan untuk tim satgas dan tim pendamping lapangan untuk selalu siaga, dapat melaksanakan pendataan dan verifikasi apabila terjadi bencana dan relokasi akibat Program pemerintah daerah.

2. Kegiatan Pemantapan Tugas Tim Satgas dan Fasilitator Serta Sosialisasi Standart Teknis Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah

Kegiatan ini dilaksanakan pada Selasa, 8 Oktober 2024. Sosialisasi ini bertujuan untuk memantapkan tugas tim satgas dan sosialisasi untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa pentingnya letak rumah, penataan rumah, memperhatikan aspek kesehatan, bahaya kebencanaan, dan mewaspadaai rumah apabila terdapat di sempadan sungai. Sosialisasi ini dihadiri oleh LPMK, RW disekitar sungai lahar, Kelurahan, Kecamatan dan materi

disampaikan oleh pihak yang membidangi mengenai rumah dalam aspek kesehatan, standart teknis rumah sederhana, bahaya bencana yang ada di Kota Blitar serta pertauran tentang sempadan sungai menurut aspek Sumber Daya Alam. Peserta sejumlah ± 75 orang peserta. Anggaran dalam kegiatan ini secara global yaitu sebesar Rp. 13.760.000.

3. Verifikasi dan Survey lapangan rumah terdampak bencana pada Rabu, 17 Januari 2024. Kegiatan ini bertujuan untuk menindaklanjuti laporan keluhan tentang terjadi kerusakan rumah akibat Angin kencang yang disertai hujan sehingga menyebabkan atap rusak terhempas angin. Dengan adanya verifikasi dan survey lapangan dapat dipertimbangkan untuk mendapatkan bantuan rehabilitasi rumah.
4. Kegiatan Rehabilitasi Rumah akibat bencana Angin kencang yang disertai hujan sehingga menyebabkan atap rusak terhempas angin. Kegiatan ini bertujuan untuk merehabilitasi rumah sehingga dapat dihuni kembali dengan nyaman dan aman. Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi yaitu pada bulan Februari 2024. Anggaran Rehabilitasi Rumah akibat bencana ini yaitu Rp. 7.530.000.
Adapun dokumentasi kegiatan sebagai berikut :



Before

After

Gambar 4. Rehabilitasi Rumah akibat bencana Angin kencang yang disertai hujan

5. Kegiatan Kajian Penyusunan Materi Teknis dan Rancangan Perwali SPM Bidang Perumahan Rakyat Kota Blitar. Adapun tujuan dari kegiatan ini yaitu untuk menghasilkan sebuah dokumen Materi Teknis dan Rancangan Peraturan yang menjadi pedoman penanganan rumah masyarakat terdampak bencana dan relokasi program pemerintah. Pelaksanaan kegiatan ini yaitu pada 25 Juli 2024 sampai dengan 7 Oktober 2024. Anggaran Kegiatan ini yaitu Rp.50.000.000.

B. Akuntabilitas Keuangan (Cost per Outcome)

Adapun kebijakan keuangan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman pada tahun 2024 berpedoman pada Renstra Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman 2021 - 2026 yang telah ditetapkan, sehingga dapat mendukung pencapaian sasaran strategis daerah. Kebijakan keuangan dilaksanakan dengan memperhatikan efisiensi dan efektivitas penggunaan belanja daerah

dengan mengutamakan pencapaian program dan kegiatan prioritas melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD.

Untuk mewujudkan komitmen kinerja Tahun 2024 sebagaimana uraian tersebut di atas, Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Blitar menganggarkan program/kegiatan dalam APBD 2024. Adapun anggaran tahun 2024 tersebut adalah sebagai berikut :

1. Belanja Operasi : Rp. 10.664.252.383,-
2. Belanja Modal : Rp. 1.714.623.248,-

J u m l a h : Rp. 12.378.875.631,-

1. Alokasi Per Sasaran Pembangunan

Untuk mencapai target kinerja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman didukung dengan penganggaran yang dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.12 Alokasi per Sasaran Pembangunan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Anggaran	
				Rp.	%
1	Meningkatnya akses rumah layak huni		Rasio Rumah Layak Huni		
1.1		Meningkatnya rumah layak huni sesuai standar	Persentase Rumah Layak Huni	4.493.142.479	36,297
2	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas di Kawasan Permukiman		Persentase perumahan dan kawasan permukiman dengan PSU layak		
2.1		Meningkatnya kualitas sarana prasarana di perumahan dan kawasan permukiman	Persentase perumahan dan kawasan permukiman yang dilengkapi jalan dan drainase lingkungan dalam kondisi baik	2.980.344.781	24,076
3		Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP PD	4.905.388.371	36,627
		JUMLAH		12.378.875.631	100

Tujuan Meningkatnya akses rumah layak huni dengan sasaran Meningkatnya rumah layak huni sesuai standar dengan alokasi anggaran Rp. 4.493.142.479,- (36,297 %), sedangkan Tujuan Meningkatnya ketersediaan dan kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas di Kawasan Permukiman dengan sasaran Meningkatnya kualitas sarana prasarana di perumahan dan kawasan permukiman dengan alokasi anggaran Rp. 2.980.344.781,- (24,076 %) didukung oleh sasaran Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran Rp. 4.905.388.371,- (36,627 %).

2. Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Pencapaian kinerja juga didukung dengan realisasi anggaran. Pada tahun 2024 pencapaian kinerja dan realisasi anggaran adalah sebagai berikut :

Tabel 3.13 Pencapaian Kinerja dan Anggaran

No	Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran		Realisasi Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
	URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN				12.378.875.631		12.036.829.598		97,24
	Tujuan 1 : Meningkatkan akses rumah layak huni	Rasio Rumah Layak Huni	Rasio	0,255		0,26		101,96	
	Sasaran 1 : Meningkatkan rumah layak huni sesuai standar	Persentase rumah layak huni	%	98,59	4.493.142.479	98,66	4.395.445.328	100,07	97,83

No	Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran		Realisasi Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana dan relokasi program pemerintah	%	100	991.895.479	100	930.165.943	100	93,78
		Persentase tingkat hunian Rusunawa	%	95		95		100	
	<i>Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota</i>	<i>Persentase data perumahan yang tersusun dan terupdate</i>	%	80	118.794.800	80	117.818.450	100	99,18
	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	dokumen	2	118.794.800	2	117.818.450	100	99,18
	<i>Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota</i>	<i>Persentase rumah tangga korban bencana atau relokasi program kabupaten/ kota yang mendapatkan sosialisasi</i>	%	100	47.481.800	100	42.631.900	100	89,79

No	Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran		Realisasi Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	orang	100	47.481.800	100	42.631.900	100	89,79
	<i>Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota</i>	<i>Persentase penyediaan jenis layanan perumahan bagi korban bencana/relokasi program kabupaten/kota</i>	%	100	74.707.350	100	42.504.915	100	56,90
	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	unit rumah	6	74.707.350	2	42.504.915	33,33	56,90
	<i>Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus</i>	<i>IKM Pengelolaan Rusunawa</i>	<i>indeks</i>	86,26	750.911.529	92,42	727.210.678	107,1412	96,84
	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	dokumen	1	750.911.529	1	727.210.678	100	96,84

No	Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran		Realisasi Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
2	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase rumah tidak layak huni/rusak yang ditingkatkan kualitasnya di luar kawasan kumuh	%	20,11	3.064.942.000	30,65	3.048.376.885	152,41	99,46
		Persentase pembangunan rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	%	1,03		1,55		150,49	
	<i>Urusan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Persentase pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh yang dilaksanakan</i>	%	95	3.064.942.000	98	3.048.376.885	103,16	99,46
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	unit	108	3.064.942.000	185	3.048.376.885	171,30	99,46

No	Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran		Realisasi Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
	Tujuan 2 : Meningkatnya ketersediaan dan kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas di Kawasan Permukiman	Persentase perumahan dan kawasan permukiman dengan PSU layak	%	85,64		86,17		100,6 2	
	Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas sarana prasarana di perumahan dan kawasan permukiman	Persentase perumahan dan kawasan permukiman yang dilengkapi jalan dan drainase lingkungan dalam kondisi baik	%	79,26	2.980.344.781	86,29	2.965.474.159	108,8 695	99,50
3	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase rumah tidak layak huni/rusak yang ditingkatkan kualitasnya di kawasan kumuh	%	13,09	2.009.760.179	2,31	1.977.179.023	17,65	98,38
		Persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik di kawasan permukiman	%	76,17		85,10		111,7 2	
		Persentase drainase lingkungan dalam kondisi baik di kawasan permukiman	%	78,09		87,48		112,0 246	
	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah laporan dan data base permukiman yang tersusun	dokumen	5	129.500.000	5	126.505.165	100	97,69

No	Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran		Realisasi Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	laporan	2	30.000.000,00	2	28.659.000	100	95,53
	Penyusunan/Review/Legalisisi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi	dokumen	1	89.500.000	1	88.072.665	100	98,41
	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina	Kelompok Masyarakat	2	10.000.000	2	9.773.500	100	97,74
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah rumah tidak layak huni di kawasan kumuh yang telah ditingkatkan kualitasnya	unit	318	1.880.260.179	189	1.850.673.858	59,43 396	98,43
		Panjang drainase lingkungan permukiman dalam kondisi baik	m	73.663		119.726,55		162,5328	
		Panjang jalan lingkungan permukiman dalam kondisi baik	m	130663		200.499,85		153,45	
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	unit rumah	19	436.305.000	21	416.902.500	110,5263	95,55

No	Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran		Realisasi Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	laporan	4	419.732.500,00	4	411.354.936	100	98,00
	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	Dokumen	1	46.382.550	1	45.754.625	100	98,65
	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan	Ha	4,5	977.840.129	11,43	976.661.797	254	99,88
4	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase drainase lingkungan dalam kondisi baik di kawasan perumahan	%	86	1.406.889.602	87	1.406.408.500	101,1628	99,97
		Persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik di kawasan perumahan	%	87		92,5		106,3218	
	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Panjang drainase lingkungan perumahan dalam kondisi baik	m	17475	1.406.889.602	16087,46	1.406.408.500	92,05986	99,97
		Panjang jalan lingkungan perumahan dalam kondisi baik	m	22123		30030,8		135,7447	

No	Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran		Realisasi Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	lokasi	4	1.398.939.602	5	1.397.290.136	125	99,88
	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	laporan	4	7.950.000	4	7.907.500	100	99,47
	Tujuan 3 : Meningkatkan tata kelola perangkat daerah	Nilai SAKIP PD	Nilai	A 86,30		A 86,73		A 100,5	
	Sasaran 3 : Meningkatkan kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP PD	Nilai	A 86,30	4.905.388.371	A 86,73	4.675.910.111	A 100,5	95,32
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	85,73	4.905.388.371	92,42	4.675.910.111	107,8 036	95,32
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	%	100	8.145.000	100	8.135.000	100	99,88

No	Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran		Realisasi Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	15	3.375.500	15	3.370.000	100	99,84
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	12	4.769.500	12	4.765.000	100	99,91
	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar</i>	%	100	3.425.486.116	100	3.255.294.552	100	95,03
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	25	3.422.436.116	24	3.252.244.552	96	95,03
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	7	3.050.000	7	3.050.000	100	100,00

No	Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran		Realisasi Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar</i>	%	100	106.311.500	100	105.860.000	100	99,58
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	paket	2	67.519.700	2	67.515.000	100	99,99
	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	orang	50	38.791.800	49	38.345.000	98	98,85
	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar</i>	%	100	366.588.000	100	356.286.281	100	97,19
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	1	8.689.100	1	8.112.000	100	93,36
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	3	21.709.200	3	20.402.500	100	93,98
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	4	13.289.300	4	12.057.000	100	90,73

No	Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran		Realisasi Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	paket	30	56.445.000	30	56.445.000	100	100,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	1	19.582.400	1	18.986.400	100	96,96
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	40	219.923.000	46	213.333.381	115	97,00
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	dokumen	5	26.950.000	5	26.950.000	100	100,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	%	87	29.300.000	87	29.300.000	100	100,00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	3	29.300.000	3	29.300.000	100	100,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	%	100	812.976.055	100	784.113.775	100	96,45

No	Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran		Realisasi Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	24	73.182.055	33	54.707.787	137,5	74,76
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	264	739.794.000	286	729.405.988	108,3 333	98,60
	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar</i>	%	100	156.581.700	100	136.920.503	100	87,44
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	10	120.385.900	10	102.245.503	100	84,93
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	25	36.195.800	25	34.675.000	100	95,80

3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dari pencapaian kinerja dan penyerapan anggaran dapat dilihat efisiensi penggunaan sumber daya sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.14 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Capaian Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi (%)
1	2	3	4	5 = 3/4
Meningkatnya akses rumah layak huni	Rasio Rumah Layak Huni	101,96	97,83	1,042
Meningkatnya rumah layak huni sesuai standar	Persentase Rumah Layak Huni	100,07	97,83	1,023
Meningkatnya ketersediaan dan kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas di Kawasan Permukiman	Persentase perumahan dan kawasan permukiman dengan PSU layak	100,62	99,50	1,011
Meningkatnya kualitas sarana prasarana di perumahan dan kawasan permukiman	Persentase perumahan dan kawasan permukiman yang dilengkapi jalan dan drainase lingkungan dalam kondisi baik	108,87	99,50	1,094
Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP PD	100,5	95,32	1,054

Analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya diatas adalah sebagai berikut :

- Meningkatnya akses rumah layak huni dengan indicator kinerja Rasio Rumah Layak Huni tingkat efisiensinya sebesar 1,042, bahwa dengan capaian kinerja 101,96% membutuhkan anggaran sebesar 97,83 % dari total pagu anggaran. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pencapaian pada sasaran ini dikatakan efisien.
- Meningkatnya rumah layak huni sesuai standar dengan indikator kinerja Persentase Rumah Layak Huni tingkat efisiensinya sebesar 1,023,

bahwa dengan capaian kinerja 100,07% membutuhkan anggaran sebesar 97,83 % dari total pagu anggaran. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pencapaian pada sasaran ini dikatakan efisien. Upaya yang telah dilakukan adalah dengan dilaksanakannya Program Pengembangan Perumahan, Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh dan Program Kawasan Permukiman.

- iii. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas di Kawasan Permukiman dengan indikator kinerja Persentase perumahan dan kawasan permukiman dengan PSU layak tingkat efisiensinya sebesar 1,011, bahwa dengan capaian kinerja 100,62% membutuhkan anggaran sebesar 99,50 % dari total pagu anggaran. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pencapaian pada sasaran ini dikatakan efisien.
- iv. Meningkatnya kualitas sarana prasarana di perumahan dan kawasan permukiman dengan indikator kinerja Persentase perumahan dan kawasan permukiman yang dilengkapi jalan dan drainase lingkungan dalam kondisi baik tingkat efisiensinya sebesar 1,094 dengan capaian kinerja 108,87 % membutuhkan anggaran sebesar 99,50 % dari total pagu anggaran. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pada pencapaian sasaran dikatakan efisien. Upaya yang dilakukan adalah dengan dilaksanakannya Program Kawasan Permukiman dan Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU).
- v. Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah dengan indicator kinerja Nilai SAKIP PD tingkat efisiensi sebesar 1,054 dengan capaian kinerja 100,5 % dan capaian penyerapan anggaran 95,32 % dari total pagu anggaran. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pada pencapaian sasaran dikatakan efisien. Upaya yang dilakukan adalah dengan dilaksanakannya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Faktor pendorong tercapainya efisiensi anggaran adalah sebagai berikut :

1. Pemahaman dan wawasan yang mumpuni untuk menjaga dan memelihara aspek-aspek kelayak hunian
2. Adanya koordinasi dan kolaborasi antar OPD dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dalam penanganan kawasan permukiman
3. Sinergitas antar bidang dalam pelaksanaan program dan kegiatan

C.. Prestasi / Penghargaan

Selama tahun 2024 prestasi / penghargaan yang diperoleh Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Blitar adalah :

1. Predikat nilai A (Memuaskan) Terbaik ke 3 dari 30 OPD dengan predikat nilai A 86,73 (Memuaskan) dalam Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024.





2. Ikut mendukung penurunan angka kemiskinan kota

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan :

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Tahun 2024 merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Blitar berdasar pada akuntabilitas. LKj IP juga disusun karena perannya sebagai alat kendali, penilai kualitas kinerja dan sebagai pendorong perwujudan Good Governance. Dilain pihak, LKj IP juga merupakan media pertanggungjawaban kepada publik yang dapat digunakan sebagai alat introspeksi dan refleksi terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab.

Pada Tahun 2024 Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja dengan capaian kinerja sebagai berikut :

1. Meningkatnya akses rumah layak huni dengan indicator Rasio Rumah Layak Huni dari target 0,255 realisasi 0,26 atau tercapai 101,96 % masuk kriteria sangat berhasil;
2. Meningkatnya rumah layak huni sesuai standar dengan indikator Persentase Rumah Layak Huni dari target 98,59 % telah terealisasi 98,66 % atau tercapai 100,07 % masuk kriteria sangat berhasil;
3. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas di Kawasan Permukiman dengan indicator Persentase perumahan dan kawasan permukiman dengan PSU layak dari target 85,64 % telah terealisasi 86,17 % atau tercapai 100,62 % masuk kriteria sangat berhasil;
4. Meningkatnya kualitas sarana prasarana di perumahan dan kawasan permukiman dengan indikator Persentase

perumahan dan kawasan permukiman yang dilengkapi jalan dan drainase lingkungan dalam kondisi baik dari target 79,26 % telah terealisasi 86,29 % atau tercapai 108,87 % masuk kriteria sangat berhasil;

5. Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah dengan indikator Nilai Sakip PD dari target 86,30 terealisasi 86,73 atau tercapai 100,5 % masuk kriteria sangat berhasil.

Sebagai evaluasi atas kinerja organisasi periode akhir masa jabatan walikota sebagaimana janji politik yang wajib dicapai diakhir masa jabatan, maka dilaporkan capaian misi ke 4 (empat) dan Sapta Program yang diampu Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Blitar adalah sebagai berikut :

Tujuan/Sasaran Misi 4/ Sapta Program	Indikator	Realisasi		
		2022	2023	2024
Meningkatnya Kelayakhunian	Rasio Permukiman Layak Huni	0,975	0,981	0,984
Meningkatnya akses rumah layak huni	Rasio Rumah Layak Huni	0,251	0,251	0,26
Blitar Membangun dan Kondusif	Bedah Rumah	282	287	206

Secara keseluruhan keterkaitan dalam pencapaian kinerja utama dalam mewujudkan tujuan, visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Blitar Tahun 2024 dapat dikatakan baik walaupun masih ada hal- hal yang harus diperhatikan agar kinerja Dinas Perumahan Rakyat Dan kawasan Permukiman Kota Blitar semakin baik.

B. Langkah Perbaikan

Langkah – langkah yang akan dilakukan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman kota Blitar untuk terus berkinerja baik adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1. Rencana Tindak Lanjut LKjIP Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar

No	Langkah Perbaikan LKi IP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Timeline		
				Tahun 2025 (Murni)	Tahun 2025 (Perubahan)	Tahun 2026
1	Meningkatnya akses rumah layak huni	- o Dilaksanakan sosialisasi standar teknis rumah layak huni - o Pendampingan dalam penerapan standar rumah layak huni pada program stimulan bansos.	Program Pengembangan Perumahan Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	√	√	√
2	Meningkatnya Rumah Layak Huni sesuai Standar	- o Melaksanakan Verifikasi dan updating data serta penguatan regulasi terkait standar rumah layak huni serta klasifikasi penerima program - o Melaksanakan sosialisasi guna meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam keswadayaan peningkatan kualitas rumah dan Penguatan proses verifikasi penerima program	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh; Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	√	√	√

No	Langkah Perbaikan LKi IP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Timeline		
				Tahun 2025 (Murni)	Tahun 2025 (Perubahan)	Tahun 2026
3	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas di Kawasan Permukiman	Perlu adanya koordinasi antar OPD dalam merencanakan suatu kegiatan sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan kegiatan	Program Kawasan Permukiman Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	√	√	√
4	Meningkatnya kualitas sarana prasarana di perumahan dan kawasan permukiman	Melaksanakan koordinasi dan kolaborasi antar Perangkat Daerah dalam penanganan jalan dan drainase lingkungan di kawasan perumahan dan permukiman	Program Kawasan Permukiman Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	√	√	√
5	Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Memanfaatkan rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal secara optimal untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		√	√

Demikian beberapa hal yang disampaikan dalam LKj IP Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Blitar semoga dapat memberikan gambaran atas pelaksanaan kinerja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Blitar dalam mewujudkan visi dan misi Kota Blitar.

Blitar, 26 Februari 2025

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN KOTA BLITAR



Drs. SUYATNO
NIP. 197304301993031004

MATRIK RENCANA STRATEGIS
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA BLITAR
TAHUN 2021 - 2026

VISI : KOTA BLITAR KEREN, UNGGUL, MAKMUR DAN BERMARTABAT
MISI : Mewujudkan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan

TUJUAN					SASARAN					CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN			KET
URAIAN	INDIKATOR	FORMULA PERHITUNGAN	KONDISI AWAL	TARGET	URAIAN	INDIKATOR	FORMULA PERHITUNGAN	KONDISI AWAL	TARGET	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	
			2020	2024				2020	2024				
Meningkatnya akses rumah layak huni	Rasio Rumah Layak Huni	Jumlah rumah layak huni/jumlah penduduk	0,242	0,255	Meningkatnya rumah layak huni sesuai standar	Persentase rumah layak huni	Jumlah rumah layak huni sesuai standar kelayakan bangunan/jumlah rumah x 100%	96,05 %	98,59 %	Peningkatan akses rumah layak huni	1. Peningkatan kualitas rumah tidak layak/rusak 2. Peningkatan kualitas rumah tidak layak/rusak di kawasan permukiman kumuh 3. Penyediaan rumah bagi korban relokasi program pemerintah 4. Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana 5. Peningkatan pemberian rekomendasi pengembangan perumahan 6. Peningkatan ketersediaan rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	- PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	

TUJUAN					SASARAN					CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN			KET
URAIAN	INDIKATOR	FORMULA PERHITUNGAN	KONDISI AWAL	TARGET	URAIAN	INDIKATOR	FORMULA PERHITUNGAN	KONDISI AWAL	TARGET	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	
			2020	2024				2020	2024				
Meningkatnya ketersediaan dan kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas di Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase perumahan dan kawasan permukiman dengan PSU layak	Jumlah perumahan dan kawasan permukiman dengan PSU layak/Jumlah perumahan dan kawasan permukiman x 100%	63,3 %	85,64 %	Meningkatnya kualitas sarana prasarana di perumahan dan kawasan permukiman	Persentase perumahan dan kawasan permukiman yang dilengkapi jalan dan drainase lingkungan dalam kondisi baik	Jumlah perumahan dan kawasan permukiman yang berakses jalan dan drainase lingkungan dalam kondisi baik/Jumlah perumahan dan kawasan permukiman x 100%	63,3 %	79,26 %	1. Peningkatan ketersediaan jalan lingkungan memadai 2. Peningkatan ketersediaan dan kualitas drainase	1. Peningkatan pemeliharaan dan rehabilitasi jalan lingkungan di kawasan permukiman 2. Peningkatan pemeliharaan dan rehabilitasi jalan lingkungan di kawasan perumahan 3. Optimalisasi pemeliharaan dan rehabilitasi drainase lingkungan di kawasan permukiman 4. Optimalisasi pemeliharaan dan rehabilitasi drainase lingkungan di kawasan perumahan	- PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	
Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Penilaian atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah oleh Inspektorat Daerah pada tahun bersangkutan	A 82,89	A 86,30	Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Penilaian atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah oleh Inspektorat Daerah pada tahun bersangkutan	A 82,89	A 86,30	Peningkatan implementasi akuntabilitas kinerja pada perangkat daerah	Penyempurnaan penyusunan dan penerapan dokumen akuntabilitas kinerja perangkat daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	

Blitar , 23 September 2024

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman
Kota Blitar,
Drs. SUYATNO
Pembina Tk. I/IV/b
NIP. 19730430199051004

PERUBAHAN RENCANA KINERJA TAHUNAN TA 2024
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA BLITAR

No.	TUJUAN			Sasaran			Program Perangkat Daerah			Kegiatan			Sub Kegiatan				Anggaran	
	Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Program Perangkat Daerah	Indikator Program	Target	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target			
															Semula	Menjadi	Semula	Menjadi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Meningkatkan akses rumah layak huni	Rasio Rumah Layak Huni	0,255%	Meningkatnya rumah layak huni sesuai standar	Persentase rumah layak huni	98,59%	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana dan relokasi program pemerintah	100 %	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase data penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program pemerintah yang tersusun dan terupdate	80%	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	2 dokumen	2 dokumen	61.974.800	118.794.800
										Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase rumah tangga korban bencana atau relokasi program kabupaten/ kota yang mendapatkan sosialisasi	100 %	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	100 orang	100 orang	21.865.000	47.481.800
										Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase penyediaan jenis layanan perumahan bagi korban bencana/relokasi program kabupaten/kota	100 %	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	6 unit rumah	6 unit rumah	74.707.350	74.707.350
								Persentase tingkat hunian Rusunawa	95 %	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	IKM Pengelolaan Rusunawa	86,26	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	1 dokumen	1 dokumen	715.911.529	750.911.529
							PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase rumah tidak layak huni/rusak yang ditingkatkan kualitasnya di luar kawasan kumuh	20,11%	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh yang dilaksanakan	95%	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	108 unit rumah	108 unit rumah	3.058.478.800	3.064.942.000
								Persentase pembangunan rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	1,03 %									
							PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase rumah tidak layak huni/rusak yang ditingkatkan kualitasnya di kawasan kumuh	13,09%	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah rumah tidak layak huni di kawasan kumuh yang telah ditingkatkan kualitasnya	318 unit	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	19 unit rumah	19 Unit	426.305.000	436.305.000

No.	TUJUAN			Sasaran			Program Perangkat Daerah			Kegiatan			Sub Kegiatan				Anggaran	
	Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Program Perangkat Daerah	Indikator Program	Target	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target			
															Semula	Menjadi	Semula	Menjadi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas di Kawasan Permukiman	Persentase perumahan dan kawasan permukiman dengan PSU layak	85,64%	Meningkatnya kualitas sarana prasarana di perumahan dan kawasan permukiman	Persentase perumahan dan kawasan permukiman yang dilengkapi jalan dan drainase lingkungan dalam kondisi baik	79,26 %	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik di kawasan permukiman	78,09%	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah laporan dan dokumen data base permukiman yang tersusun	5 dokumen	Penyusunan/Review/Legalisa si Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Terreview/Terlegalisasi	1 dokumen	1 dokumen	90.000.000	89.500.000
								Persentase drainase lingkungan dalam kondisi baik di kawasan permukiman	76,17%				Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina	2 Kelompok Masyarakat	2 Kelompok Masyarakat	10.000.000	10.000.000
													Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	2 laporan	2 laporan	30.000.000	30.000.000
										Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Panjang jalan lingkungan permukiman dalam kondisi baik	130.663 meter	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	4 laporan	4 laporan	421.839.500	419.732.500
											Panjang drainase lingkungan permukiman dalam kondisi baik	73.663 meter	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/Dipugar	4,5 Ha	4,5 Ha	1.097.210.400	977.840.129
													Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	1 dokumen	1 dokumen	25.000.000	46.382.550
							PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik di kawasan perumahan	87%	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Panjang jalan lingkungan perumahan dalam kondisi baik	22123 meter	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	4 lokasi	4 lokasi	1.390.425.000	1.398.939.602
								Persentase drainase lingkungan dalam kondisi baik di kawasan perumahan	86%		Panjang drainase lingkungan perumahan dalam kondisi baik	17475 meter	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi penyediaan PSU Perumahan	4 laporan	4 laporan	4.770.000	7.950.000
3	Meningkatnya tata kelola perangkat daerah			Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP PD	A 86.30	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	B 85,73 indeks	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100%	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15 dokumen	15 dokumen	3.375.500	3.375.500

No.	TUJUAN			Sasaran			Program Perangkat Daerah			Kegiatan			Sub Kegiatan				Anggaran	
	Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Program Perangkat Daerah	Indikator Program	Target	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target			
															Semula	Menjadi	Semula	Menjadi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
													Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 dokumen	12 dokumen	4.769.500	4.769.500
										Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100%	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 orang/bulan	25 orang/bulan	3.422.204.318	3.422.436.116
													Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	7 laporan	7 laporan	3.050.000	3.050.000
										Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100%	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 paket	2 paket	69.755.000	67.519.700
													Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan	50 orang	50 orang	38.791.800	38.791.800
										Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100%	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	8.689.100	8.689.100
													Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 paket	3 paket	21.709.200	21.709.200
													Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 paket	4 paket	13.289.300	13.289.300
													Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	30 paket	30 paket	49.025.000	56.445.000
													Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	1 paket	19.582.400	19.582.400
													Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 laporan	40 laporan	199.923.000	219.923.000
													Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5 Dokumen	5 Dokumen	30.125.700	26.950.000
										Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	87%	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 unit	3 unit	26.356.098	29.300.000

No.	TUJUAN			Sasaran			Program Perangkat Daerah			Kegiatan			Sub Kegiatan				Anggaran		
	Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Program Perangkat Daerah	Indikator Program	Target	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target				
															Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
										Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100%	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 laporan	24 laporan	73.182.055	73.182.055	
													Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	264 laporan	264 laporan	739.794.000	739.794.000	
										Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100%	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 unit	10 unit	131.681.400	120.385.900	
													Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 unit	25 unit	30.085.000	36.195.800	
													JUMLAH					12.313.875.750	12.378.875.631

Blitar, 23 September 2023

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman

Kota Blitar,



Drs. SUYATNO

Pembina Tk. I-IV/b

NIP. 197304301993031004

PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KOTA BLITAR



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Drs. SUYATNO**
Jabatan : **Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. SANTOSO, M.Pd**
Jabatan : **Walikota Blitar**
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Walikota Blitar,

Drs. SANTOSO, M.Pd

Blitar, 23 September 2024
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kota Blitar

Drs. SUYATNO
Pembina Tk. I-IV/b
NIP. 197304301993031004

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KOTA BLITAR

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas di Kawasan Permukiman	Persentase perumahan dan kawasan permukiman dengan PSU layak	85.64(%)
2	Meningkatnya akses rumah layak huni	Rasio Rumah Layak Huni	0.25(Rasio)
3	Meningkatnya kualitas sarana prasarana di perumahan dan kawasan permukiman	Persentase perumahan dan kawasan permukiman yang dilengkapi jalan dan drainase lingkungan dalam kondisi baik	79.26(%)
4	Meningkatnya rumah layak huni sesuai standar	Persentase rumah layak huni	98.59(%)
5	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP PD	86.30(Nilai)

No	Program	Anggaran (Rp.)	Keterangan
1	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1,406,889,602.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
2	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	3,064,942,000.00	Insentif Fiskal
3	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	2,009,760,179.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil,Insentif Fiskal
4	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	991,895,479.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4,905,388,371.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum,Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Total:		12,378,875,631.00	

Walikota Blitar,

Drs. SANTOSO, M.Pd

Blitar, 23 September 2024
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kota Blitar,

Drs. SUYATNO
Pembina Tk.I-IV/b
NIP. 197304301993031004

PENGUKURAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

Perangkat Daerah
Tahun

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2024

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET	REALISASI	%	KET.	PROGRAM	PAGU Rp.	REALISASI	%	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatkan akses rumah layak huni	Rasio Rumah Layak Huni	Jumlah rumah layak huni/jumlah penduduk	0,255	0,26	101,96						
1.1	Meningkatnya rumah layak huni sesuai standar	Persentase rumah layak huni	Jumlah rumah layak huni sesuai standar kelayakan bangunan/jumlah rumah x 100%	98,59%	98,66%	100,07		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	991.895.479	930.165.943	93,78	
								PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	3.064.942.000	3.048.376.885	99,46	
								PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	436.305.000	416.902.500	95,55	
2	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas di Kawasan Permukiman	Persentase perumahan dan kawasan permukiman dengan PSU layak	Jumlah perumahan dan kawasan permukiman dengan PSU layak / Jumlah perumahan dan kawasan permukiman x 100%	85,64%	86,17%	100,62						

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET	REALISASI	%	KET.	PROGRAM	PAGU Rp.	REALISASI	%	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.1	Meningkatnya kualitas sarana prasarana di perumahan dan kawasan permukiman	Persentase perumahan dan kawasan permukiman yang dilengkapi jalan dan drainase lingkungan dalam kondisi baik	Jumlah perumahan dan kawasan permukiman yang berakses jalan dan drainase lingkungan dalam kondisi baik/Jumlah perumahan dan kawasan permukiman x 100%	79,26%	86,29%	108,87		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1.573.455.179	1.560.276.523	99,16	
								PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1.406.889.602	1.405.197.636	99,88	
3	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP PD	Hasil Nilai SAKIP Dinas Perumahan Rakyat pada tahun n	A 86,30	A 86,73	100,5		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.905.388.371	4.675.910.111	95,32	
TOTAL									12.378.875.631	12.036.829.598	97,24	

Blitar, 31 Desember 2024
KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN KOTA BLITAR


Drs. SUYATNO
Pembina Tk. I
NIP. 197304301993031004

Show 10 entries

Search:

No.	Kabupaten/Kota	Luas Kumuh Awal (Ha)	Kumulatif Penanganan (Ha)	Sisa Luas Kumuh(Ha)	Aksi
1	Kab. Pacitan	16.48	2.82	13.66	Detail
2	Kab. Ponorogo	192.03	8.41	183.62	Detail
3	Kab. Trenggalek	174.17	8.49	165.68	Detail
4	Kab. Tulungagung	194.51	19.49	175.02	Detail
5	Kab. Blitar	437.60	49.29	388.31	Detail
6	Kab. Kediri	480.25	182.05	298.19	Detail
7	Kab. Malang	142.87	1.85	141.02	Detail
8	Kab. Lumajang	763.97	6.61	757.36	Detail
9	Kab. Jember	574.05	222.66	351.39	Detail
10	Kab. Banyuwangi	95.08	7.62	87.46	Detail

Show 10 entries

Search:

No. ↑↓	Kabupaten/Kota ↑↓	Luas Kumuh Awal (Ha) ↑↓	Kumulatif Penanganan (Ha) ↑↓	Sisa Luas Kumuh(Ha) ↑↓	Aksi ↑↓
11	Kab. Bondowoso	433.92	2.71	431.21	Detail
12	Kab. Situbondo	102.84	0.00	102.84	Detail
13	Kab. Probolinggo	201.77	3.63	198.14	Detail
14	Kab. Pasuruan	440.44	4.07	436.37	Detail
15	Kab. Sidoarjo	140.43	113.78	26.65	Detail
16	Kab. Mojokerto	246.51	16.81	229.70	Detail
17	Kab. Jombang	618.16	2.36	615.80	Detail
18	Kab. Nganjuk	83.33	45.68	37.65	Detail
19	Kab. Madlun	161.41	36.43	124.98	Detail
20	Kab. Magetan	292.03	9.55	282.48	Detail

Show 10 entries

Search:

No.	Kabupaten/Kota	Luas Kumuh Awal (Ha)	Kumulatif Penanganan (Ha)	Sisa Luas Kumuh(Ha)	Aksi
21	Kab. Ngawi	48.13	0.00	48.13	Detail
22	Kab. Bojonegoro	141.36	25.47	115.89	Detail
23	Kab. Tuban	211.37	66.42	144.95	Detail
24	Kab. Lamongan	360.98	2.11	358.87	Detail
25	Kab. Gresik	255.03	11.25	243.78	Detail
26	Kab. Sampang	342.48	0.00	342.48	Detail
27	Kab. Pamekasan	173.13	23.15	149.98	Detail
28	Kab. Sumenep	137.38	25.06	112.32	Detail
29	Kota Kediri	135.78	10.57	125.21	Detail
30	Kota Blitar	140.57	47.11	93.46	Detail

DATA KUMUH KABUPATEN/KOTA

Show 10 entries

Search:

No.	Kabupaten/Kota	Luas Kumuh Awal (Ha)	Kumulatif Penanganan (Ha)	Sisa Luas Kumuh(Ha)	Aksi
31	Kota Malang	27.21	0.00	27.21	Detail
32	Kota Probolinggo	23.34	1.49	21.85	Detail
33	Kota Pasuruan	117.51	2.41	115.09	Detail
34	Kota Madiun	211.11	45.01	166.10	Detail